

# EVALUASI PELAKSANAAN PINJAMAN DANA BERGULIR PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DI KELURAHAN SIANTAN HULU KECAMATAN PONTIANAK UTARA

Oleh:  
**SITI RISKY YANTI**  
NIM. E01110066

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

*E-mail: risky\_siti@yahoo.com*

## Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah terjadi tunggakan dalam pengembalian pinjaman dana bergulir, kurang tepatnya waktu pelaksanaan dan penangihan kegiatan pinjaman dana bergulir, serta tidak ditegakkan sanksi bagi KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang mengalami kemacetan dalam pengembalian dana bergulir. Penyelenggaraan kebijakan ini sesuai dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 31.1/BAPPEDA/Tahun 2012, Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKKP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kota Pontianak. Penelitian ini dengan menggunakan Teori dari William N. Dunn (dalam Nugroho 2004:186) tentang evaluasi kinerja kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antara unit pengelola keuangan dan para peminjam pinjaman dana bergulir pada waktu sosialisasi awal. Kurang lancar atau tidak lakunya usaha yang dilakukan oleh peminjam dan dana masih kurang mencukupi bagi para peminjam. Sanksi bagi peminjam yang mengalami tunggakan tidak diterapkan. Dan tidak meratanya masyarakat didaerah tersebut mendapatkan pinjaman dana bergulir sehingga waktu penagihan mengalami permasalahan dikarenakan masyarakat yang mendapatkan pinjaman bukan masyarakat asal daerah tersebut. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir, masyarakat belum benar-benar merasakan hasil yang benar-benar berpengaruh langsung untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Saran yang dapat penulis berikan ialah pelaksana kegiatan pinjaman dana bergulir dapat dilaksanakan tepat pada waktunya dan benar-benar memahami pengertian dan tujuan dari kegiatan pinjaman dana bergulir. Diharapkan meningkatkan koordinasi antara implemetor dengan para peminjam serta dapat bersosialisasi dengan baik dengan peminjam kegiatan pinjaman dana bergulir. Sanksi yang seharusnya diberikan kepada peminjam yang mengalami penunggakan dapat diterapkan dengan tegas agar para peminjam memiliki tanggung jawab sebagaimana mestinya.

Kata kunci: Evaluasi, Dana Bergulir, Pemberdayaan Masyarakat, Mandiri Perkotaan.

## Abstract

The problem in this research is going on arrears in repayment of a revolving loan fund, less precise implementation time and Billing activities revolving fund, and not enforced sanctions for SHG (Self Help Groups) that stalled in the return of the revolving fund. Implementation of this policy in accordance with the Decree of the Mayor of Pontianak No. 31.1 / BAPPEDA / In 2012, on the Establishment of Program Implementation Coordination Team (TKKP) National Program for Urban Community Empowerment (PNPM-MP) Pontianak. This study using the Theory of William N. Dunn (in Nugroho 2004: 186) regarding the performance evaluation of policy effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The method used is qualitative method with descriptive research. The results showed that the lack of coordination between the financial management unit and the revolving fund loan borrowers at the time of early socialization. Substandard behavior or not the work done by the borrower and the fund is still insufficient for borrowers. Penalties for delinquent borrowers who have not applied. And the unequal distribution of people in the area get a revolving fund so that the billing time experienced problems because the people who get a loan is not the source communities of the area. The results of the implementation of the revolving fund, the public has not really feel the results are actually a direct impact on improving the welfare of the community life. Suggestions to the

authors give is implementing activities revolving fund can be implemented on time and really understand the meaning and purpose of activities revolving fund. Expected to improve coordination between the implementation by the borrower and can socialize well with borrowers activities revolving fund. Sanctions should be granted to borrowers experiencing arrears can be strictly enforced so that borrowers have a responsibility as it should be.

*Keywords: Evaluation, Revolving Fund, Community Empowerment, Urban Self.*

## A. PENDAHULUAN

Kegiatan pinjaman dana bergulir merupakan salah satu pilihan alternatif dari berbagai alternatif kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan. Prinsip pengelolaan pemanfaatan pinjaman dana bergulir 100% harus warga miskin yang tercantum dalam PJM dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan mereka. Berdasarkan pengamatan yang ada dilapangan bahwa sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa pinjaman dana bergulir merupakan dana hibah yang tidak dikembalikan padahal seharusnya dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Selain itu terjadinya keterlambatan pengembalian dikarenakan usaha yang dilakukan para peminjam tidak semuanya berjalan dengan lancar. Tidak adanya sanksi bagi KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang tidak mengembalikan pinjaman dana bergulir tersebut.

Maka fokus penelitian ini tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, dengan mengkaji aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir PNPM-MP di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, dengan mengkaji aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada program Ilmu Administrasi Negara kajian kebijakan publik khususnya dalam evaluasi kebijakan publik. Serta dapat dijadikan referensi bagi penulis selanjutnya yang berminat melakukan penelitian tentang evaluasi pelaksanaan pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan.

Manfaat praktis berdasarkan penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan bagi pelaksana dan penerima pinjaman dana bergulir dalam kegiatan pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara agar dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir selanjutnya dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi. Untuk dapat mengetahui hasil dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka hasil dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif cepat semenjak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan.

Menurut Dunn (2003:632) mengartikan evaluasi sebagai pembuatan informasi mengenai seberapa jauh suatu hasil kebijakan memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan dan sarana kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan (Jones dalam Winarno, 2002:165). Wibawa (1994:9) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui 4 (empat) aspek yaitu :

- 1) Proses pembuatan kebijakan
- 2) Proses implementasi
- 3) Konsekuensi kebijakan
- 4) Efektivitas dampak kebijakan

Berkaitan dengan evaluasi tersebut, Winardi (1994:8) juga mengemukakan bahwa ada beberapa persoalan yang harus dijawab oleh suatu kegiatan evaluasi tersebut:

- 1) Apakah sumber daya yang menjadi input program telah cukup memadai untuk mencapai tujuan ?
- 2) Apa standar implementasi yang baik menurut kebijakan tersebut?
- 3) Apakah kegiatan dilaksanakan sesuai standar efisien dan ekonomis? Apakah uang digunakan dengan jujur dan tepat
- 4) Apakah kelompok sasaran memperoleh pelayanan dan barang seperti yang di desain dalam program?

Menurut Lester dan Stewart (dalam Agustino 2008:186) evaluasi ditujukan

untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Evaluasi kebijakan, sebagai aktivitas fungsional, sama tuanya dengan kebijakan itu sendiri, pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi kebijakan tiga hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Bahwa evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrument (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrument tersebut.
- 2) Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada.
- 3) Evaluasi kebijakan berusaha juga untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk memperoleh tujuan-tujuan tertentu yang

berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Atau lebih singkatnya evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai "manfaat" suatu kebijakan (Winarno, 2012:229). Sehingga dari beberapa pemaparan tersebut sudah jelas menyatakan bahwa proses evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang penting dan tidak mudah untuk dilakukan karena dibutuhkan ketelitian dalam menilai suatu data dan fakta yang ada sehingga dengan begitu baru dapat melihat sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan dari adanya suatu kebijakan tersebut.

Menurut William N. Dunn aspek-aspek kinerja kebijakan yang harus dievaluasi adalah sebagaimana yang tampak di dalam tabel berikut ini:

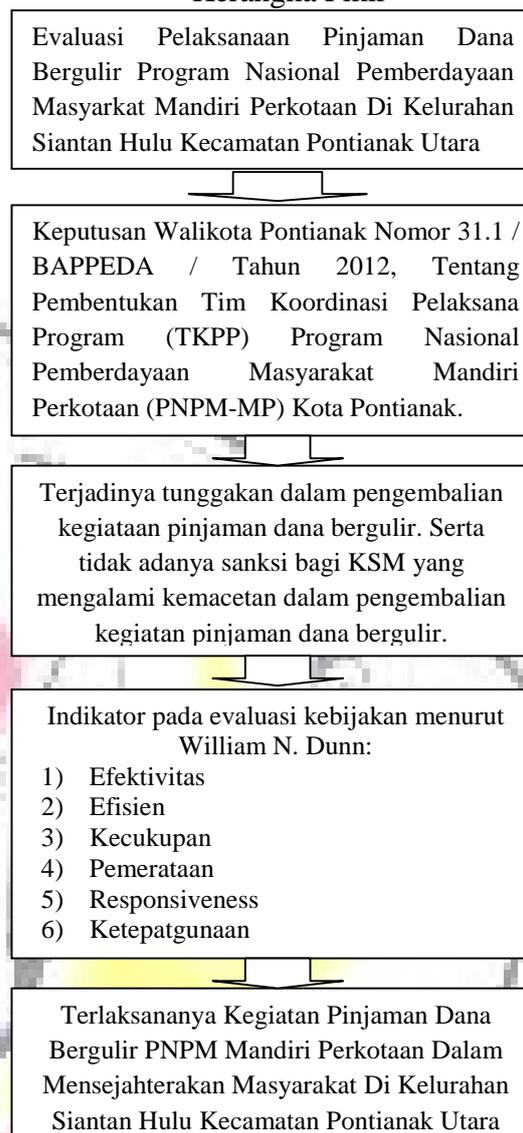
Tabel 1  
Aspek-Aspek Kinerja Kebijakan

Tipe kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai ?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan ?	Unit biaya, manfaat bersih, ratio <i>cost benefit</i>
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah	Biaya tetap, Efektivitas tetap
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda ?	Kriteria Pareto, kriteria Kaldor-Hicks, Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan/preferensi atau nilai-nilai kelompok tertentu ?	Konsistensi dengan survey warganegara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai ?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber: Riant Nugroho.D (2004:186)

Dari beberapa paparan di atas, maka teori yang penulis anggap cocok untuk mengevaluasi keberhasilan dari pelaksanaan pinjaman dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan ialah teori William N. Dunn. Dengan alasan, penulis berusaha melakukan pengukuran kondisi atau penilaian apa yang dijadikan kriteria program/kebijakan. Berikut adalah kerangka pikir penelitian dalam penelitian ini:

Gambar 1  
Kerangka Pikir



### C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Penulis memilih jenis penelitian deskriptif karena dianggap relevan dalam menggambarkan keadaan subjek dan objek yang telah ditentukan oleh penulis,

terutama dalam mendeskripsikan hasil pelaksanaan dari kegiatan pinjaman dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. Tempat penelitian yang dipilih oleh penulis adalah kelurahan siantan hulu kecamatan Pontianak utara kota Pontianak. Penelitian dilakukan penulis dari bulan Maret 2015 sampai dengan Mei 2015. Sedangkan waktu untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Januari 2016. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yang diambil secara *purposive* adalah sebagai berikut: sekretariat koordinator PNPM-MP Kelurahan Siantan Hulu, UPK (Unit Pengelola Keuangan) PNPM-MP Kelurahan Siantan Hulu, BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) PNPM-MP Kelurahan Siantan Hulu, dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) pinjaman dana bergulir.

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut: observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data, penulis menggunakan olahan pengolahan data melalui analisis data kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Aktivitas

dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Adapun untuk menguji validitas data penulis menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas**

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dengan seberapa jauh para pelaksana dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan. Selain itu, kebijakan yang diimplemetasikan dalam rangka menanggulangi kemiskinan masyarakat akan efektif apabila melibatkan implementor atau suatu organisasi yang bidang tugasnya memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan publik yang ingin diatasi. Untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir dan pertanggungjawabannya maka dibentuklah tim UPK (Unit Pengelola Keuangan).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan menunjukkan bahwa hasil yang dirasakan dari pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir dinilai dari segi efektivitas terutama di Kelurahan Siantan Hulu apabila diukur dengan ketepatan

waktu dalam melaksanakan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir yang dilaksanakan pada tahun 2012 mengalami kemacetan yang dikarenakan adanya penunggakan pengembalian dana pinjaman oleh para peminjam. Hal ini sangat berpengaruh pada hasil pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir tersebut. Kurangnya koordinasi antara unit pengelola keuangan dan para peminjam pinjaman dana bergulir mempengaruhi pada kurang efektifnya kegiatan pinjaman dana bergulir ini. Dengan terjadinya tunggakan tersebut seharusnya peminjam dikenakan sanksi sebesar 1,5%, tetapi petugas memberikan keringanan dengan memberikan penundaan bagi peminjam untuk menunda pengembalian pinjaman dana bergulir tersebut akan tetapi pada akhirnya pinjaman tersebut belum dapat dikembalikan sebagaimana seharusnya.

## 2. Efisiensi

Sasaran utama kegiatan pinjaman bergulir adalah rumah tangga miskin berpendapatan rendah (khusus dibawah 1 juta, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin). Dapat diartikan bahwa memang tujuan utama dilangsungkannya kegiatan pinjaman bergulir ini ditujukan

bagi rumah tangga miskin. Tentunya dengan adanya pinjaman bergulir ini diharapkan membuka akses rumah tangga miskin untuk berusaha meningkatkan perekonomiannya dari segi pendapatan melalui pemanfaatan dana bergulir yang pada dasarnya hanya sebagai dana stimulan bagi usaha-usaha mikro.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari informan mengenai penilaian terhadap hasil dari pelaksanaan efisiensi dari kegiatan pinjaman dana bergulir yang berkaitan dengan biaya atau dana yang digunakan dalam mencapai usaha dapat disimpulkan bahwa dana tersebut masih kurang efisien. Hal tersebut dikarenakan dana yang dipinjamkan masih kurang mencukupi biaya untuk para peminjam memajukan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dana dari kegiatan pinjaman dana bergulir ini masih kurang efisien bagi para peminjam. Tujuan pinjaman dana bergulir yaitu “menyediakan akses layanan keuangan layanan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan sebagai proses pembelajaran dalam rangka mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar, sehingga diharapkan dapat tumbuh kepercayaan diri dari pihak lain untuk dapat mengakses ke lembaga keuangan formal”. Walaupun

biaya tersebut bisa untuk menambahkan modal mereka yang hanya sedikit. Akan tetapi biaya-biaya yang dibutuhkan untuk modal usaha mereka masih kurang mencukupi.

Hasil yang diharapkan oleh para peminjam bahwa bantuan dari pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir ini dapat memperlancar usaha yang mereka kelola. Serta dapat menambah penghasilan keluarga dan mengembangkan usaha. Tetapi hasil yang dirasakan kurang mempengaruhi perekonomian masyarakat.

Menangani hal tersebut maka pelaksana harus menanggapi kebutuhan para peminjam. Dengan adanya kepedulian dari pelaksana dapat menghindari segala permasalahan atau ketidakpuasan masyarakat akan pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan yang dilaksanakan.

### **3. Adequacy atau Kecukupan**

Penilaian atau evaluasi terhadap adequacy atau kecukupan dari pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir berkaitan dengan seberapa jauh hasil yang telah dicapai dapat berhasil memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir memang belum memberikan manfaat sesuai dengan yang diharapkan. Secara umum pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir untuk memecahkan

masalah yang ada dilingkungan masyarakat belum sepenuhnya maksimal, karena apa yang sebenarnya menjadi masalah dimasyarakat belum bisa teratasi melalui pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya didalam data tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir pada tahun 2012, menyatakan bahwa hasil pelaksanaan dari kegiatan pinjaman dana bergulir yang dilaksanakan pada tahun 2012 masih jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan dari usaha-usaha yang dilakukan oleh para anggota peminjam pinjaman dana bergulir tidak semuanya lancar. Bahkan usaha atau dagangan yang dilakukan oleh salah satu anggota peminjam tidak laku atau mengalami kegagalan dalam usahanya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir yang telah dilaksanakan belum dapat memberikan hasil yang tepat bagi masyarakat yang meminjam pinjaman dana bergulir tersebut. Sehingga berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir pada tahun 2012 belum dirasakan tepat dan dapat memecahkan masalah ataupun persoalan yang dibutuhkan oleh masyarakat peminjam. Dan hasil dari pelaksanaan kegiatan pinjaman dana

bergulir pada tahun 2012 belum memberikan hasil yang benar-benar cukup atau *adequacy* yang dapat dirasakan oleh masyarakat peminjam pinjaman dana bergulir sehingga mereka belum dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

#### 4. *Equity* atau Pemerataan

Apabila dinilai dari sisi pemerataan, hasil yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir tersebut memang belum dirasakan secara merata pada seluruh anggota peminjam pinjaman dana bergulir. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan dalam pengembalian pinjaman. Keterlambatan mengembalikan pinjaman dana bergulir tersebut diakibatkan karena sebagian dari para peminjam bahwa usaha-usaha yang dikembangkan oleh para peminjam tidak sepenuhnya lancar. Dengan demikian anggota dari peminjam belum bisa mengansur pengembalian pinjaman tersebut.

Berdasarkan hasil dari wawancara bahwa sisi pemerataan yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir tersebut memang belum dirasakan secara merata pada seluruh anggota peminjam pinjaman dana bergulir. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan dalam pengembalian pinjaman. Keterlambatan mengembalikan pinjaman dana bergulir tersebut diakibatkan karena sebagian dari

para peminjam bahwa usaha-usaha yang dikembangkan oleh para peminjam tidak sepenuhnya lancar. Dengan demikian anggota dari peminjam belum bisa mengansur pengembalian pinjaman tersebut.

Masih banyak masyarakat yang tidak memahami akan pemanfaatan dana pinjaman bergulir PNPM-MP itu sendiri. Kurangnya sosialisasi dari UPK juga merupakan salah satu faktor. Tidak semua masyarakat mengerti dan memahami, masyarakat butuh arahan yang tepat dan bersifat persuasif. Selain dikarenakan keterlambatan pengembalian pinjaman dana bergulir terdapat hal lain yang menjadi permasalahan didalam indikator pemerataan ini. Hal tersebut yaitu tidak meratanya masyarakat yang mendapat pinjaman dana bergulir program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan ini. Masyarakat yang hanya mengontrak di daerah tersebut mendapatkan pinjaman dana bergulir. Setelah mereka pindah pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan sebagaimana seharusnya. Bahkan sebagian masyarakat yang mendapatkan pinjaman dana bergulir menganggap pinjaman tersebut sebagai dana hibah yang tidak perlu dikembalikan. Dengan demikian keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik dirasakan tidak merata.

## 5. *Responsiveness*

Dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan juga berhubungan dengan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya, yakni antara implementor atau pelaksana dengan kelompok sasaran atau para peminjam. Diantara bentuk komunikasi dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan adalah kegiatan sosialisasi dan pembinaan (pengarahan). Dalam sosialisasi ini akan dilakukan penjelasan-penjelasan mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan kegiatan tersebut mulai dari alasan lahirnya, maksud, tujuan, prosedur, hak dan kewajiban, larangan dan sanksi. Penilaian terhadap *responsiveness* ditujukan untuk menilai atau mengetahui hasil dari kegiatan dengan keinginan atau kebutuhan dari target group atau masyarakat pinjaman dana bergulir.

Berdasarkan hasil wawancara dan apabila dibandingkan dengan hasil pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir yang telah dilaksanakan, maka kegiatan pinjaman dana bergulir ini dirasakan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir pada tahun 2012 belum maksimal dan tidak sesuai tujuan dari kegiatan pinjaman dana bergulir yaitu

dapat mengelola dan menggunakannya secara benar.

Selain adanya masalah keterlambatan tersebut, masalah lain yang terjadi di KSM adalah tidak semua masyarakat mengerti akan hakekat PNPM itu sendiri. Dana pinjaman bergulir merupakan suatu media agar masyarakat bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya bukan hanya pinjaman seperti halnya koperasi simpan pinjam. Dengan demikian diharapkan agar pelaksanaan kegiatan pinjaman selanjutnya dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan tingkat pengembalian angsuran pinjaman dengan lancar agar program ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat peminjam pinjaman dana bergulir ini.

## 6. *Appropriateness* atau Ketepatangunaan

Penilaian terhadap *appropriateness* ditujukan untuk menilai atau mengetahui bagaimana hasil dari pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir yang direncanakan dapat terealisasi melalui dana dari kegiatan pinjaman dana bergulir. Berdasarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir ini belum sepenuhnya mencapai tujuan yang tepat. Dikarenakan sebagian dari masyarakat peminjam belum dapat memperbaiki kondisi perekonomiannya. Selain itu, kegiatan pinjaman dana bergulir ini juga

bermanfaat untuk masyarakat. Manfaat yang dirasakan dengan adanya pinjaman dana bergulir ini selain untuk dana stimulan juga dapat membantu menambahkan modal usaha.

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir ini belum sepenuhnya mencapai tujuan yang tepat yaitu untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat. Hal tersebut dikarenakan usaha dari peminjam tidak mengalami kemajuan dalam usahanya. Sehingga kegiatan pinjaman dana bergulir ini juga belum sepenuhnya bermanfaat untuk masyarakat. Adapun manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya pinjaman dana bergulir ini selain untuk dana stimulan juga dapat membantu menambahkan modal usaha.

## E. PENUTUP

### a) Simpulan

1. Kurangnya koordinasi antara unit pengelola keuangan dan para peminjam pinjaman dana bergulir berdampak pada kurang efektifnya kegiatan pinjaman dana bergulir ini. Hal ini terjadi dikarenakan pada waktu sosialisasi awal tentang kegiatan pinjaman dana bergulir yang mengalami kesalahpahaman

dengan beberapa peminjam. Selain itu dalam tahap pengembalian pinjaman peminjam mengalami kesulitan dalam mengembalikan dana pinjaman tersebut. Salah satu penyebabnya adalah kurang lancar atau tidak lakunya usaha yang dilakukan oleh peminjam.

2. Dana dari kegiatan pinjaman dana bergulir ini masih kurang efisien bagi para peminjam. Hal tersebut dikarenakan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk modal usaha mereka masih kurang mencukupi. Walaupun biaya tersebut untuk menambahkan modal mereka yang hanya sedikit. Hasil yang diharapkan oleh para peminjam bahwa bantuan dari pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir ini dapat menambah penghasilan keluarga dan mengembangkan usaha. Tetapi hasil yang dirasakan kurang mempengaruhi perekonomian masyarakat.
3. Pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir yang telah dilaksanakan belum dapat memberikan hasil yang tepat bagi masyarakat yang meminjam pinjaman dana bergulir tersebut. Adapun sanksi bagi peminjam yang mengalami tunggakan tidak diterapkan. Selain itu, tertundanya pengembalian

dikarenakan tidak semua usaha yang dilakukan oleh peminjam tidak dapat berjalan dengan lancar.

4. Hasil pelaksanaan yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir belum dirasakan secara merata oleh seluruh anggota peminjam pinjaman dana bergulir. Selain keterlambatan dalam pengembalian pinjaman pinjaman dana bergulir tersebut terdapat permasalahan lainnya. Yaitu tidak meratanya masyarakat di daerah tersebut mendapatkan pinjaman dana bergulir sehingga waktu penagihan mengalami permasalahan dikarenakan masyarakat yang mendapatkan pinjaman bukan masyarakat asal daerah tersebut.
5. Pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir pada tahun 2012 belum maksimal dan tidak sesuai tujuan dari kegiatan pinjaman dana bergulir yaitu dapat mengelola dan menggunakannya secara benar. Hal tersebut dikarenakan peminjam tidak mendapatkan manfaat sepenuhnya dalam memajukan perekonomiannya.
6. Dinilai dari hasilnya untuk peningkatan partisipasi serta kesejahteraan masyarakat pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir ini dirasa masih jauh dari harapan. Karena hasil dari

pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir, masyarakat belum benar-benar merasakan hasil yang benar-benar berpengaruh langsung untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Walaupun dengan adanya pinjaman dana bergulir ini selain untuk dana stimulan juga dapat membantu menambahkan modal usaha. Tetapi dalam pelaksanaannya manfaat yang dirasakan masih kurang mempengaruhi.

#### **b) Saran**

1. Pelaksana kegiatan pinjaman dana bergulir dapat dilaksanakan tepat pada waktunya dan meningkatkan koordinasi serta benar-benar memahami pengertian dan tujuan dari kegiatan pinjaman dana bergulir. Untuk peminjam diharapkan memiliki kesadaran dalam mengembalikan pinjaman tersebut. Agar tidak terjadi lagi tunggakan-tunggakan seperti sebelumnya.
2. Dapat meningkatkan lagi dana yang akan dipinjamkan dengan seefisien mungkin. Sehingga pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir yang dihasilkan benar-benar efektif dan penggunaan dana dari kegiatan pinjaman dana bergulir ini dapat

bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakat.

3. Para pelaksana kegiatan diharapkan memiliki sikap yang tegas bagi para peminjam pinjaman dana bergulir. Sanksi yang seharusnya diberikan kepada peminjam yang mengalami penunggakan dapat diterapkan dengan tegas agar para peminjam memiliki tanggung jawab sebagaimana mestinya.

## F. REFERENSI

### ➤ **Buku-Buku:**

Agustino, Leo. 2008. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Badjuri, Abdulkahar., Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik : Konsep Dan Strategi*. Semarang : Universitas Diponegoro.

Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.

Harry, R. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama.

Hanafi, Abdillah dan Guntur Waseso, Mulyadi. 1984, *Penelitian Untuk Mengevaluasi Efektivitas Program Kemasyarakatan*. Surabaya: Usaha nasional.

Moleong, J. Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, R.D. 2004. *Kebijakan publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

-----, 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

-----, 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Makassar: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wibawa, Samodra., Yuyun Purbokusumo., Agus Pramusinto. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

### ➤ **Sumber Lain :**

Kementerian Pekerjaan Umum, 2010. *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*. Jakarta: Ditjen Cipta Karya

Keputusan Walikota Pontianak Nomor 31.1 / BAPPEDA / Tahun 2012, Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kota Pontianak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, diambil pada tanggal 02 Januari 2014 dari <http://www.pnpm->

[mandiri.org/index.php?option=com\\_content&view=category&id=24&Itemid=324](http://mandiri.org/index.php?option=com_content&view=category&id=24&Itemid=324)  
[http://eprints.undip.ac.id/27058/1/Abstrak\\_Wahyu\\_Tri\\_P\\_D2\\_303109.pdf](http://eprints.undip.ac.id/27058/1/Abstrak_Wahyu_Tri_P_D2_303109.pdf)





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA  
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124  
Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : SITI RISKY YANTI  
 NIM / Periode lulus : E 9110066 / III  
 Tanggal Lulus : ~~25~~ Senin, 25 Januari 2016  
 Fakultas/ Jurusan : ISIPOL / ILMU ADMINISTRASI  
 E-mail address/ HP : risky-citi@yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa ..... PUBLIKA ..... \*) pada Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA ..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Evaluasi Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kelurahan Biantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara fulltex
- content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

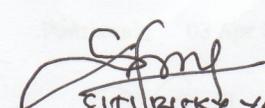
untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui  
 Pengelola Jurnal PUBLIKA .....  
  
 M. AB  
 NIP. 1971 05 02 1997 02 1092

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 04 April 2016

  
 SITI RISKY YANTI  
 NIM. E01110066

Catatan:  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission